

## PENDEKATAN *COGNITIVE MORAL* SEBAGAI KERANGKA PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PPKn DI SEKOLAH DASAR

Yogi Prihandoko<sup>1</sup>, St. Y. Slamet<sup>2</sup>, dan Winarno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

email: priehandoko@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan moral dan relevansi pendekatan *cognitive moral* sebagai kerangka pengembangan bahan ajar PPKn untuk membelajarkan nilai-nilai moral. Penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah 122 siswa kelas V sekolah dasar dan 4 guru pengampu Mata Pelajaran PPKn pada empat kecamatan di Kota Salatiga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket, wawancara, dan studi dokumen. Temuan hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman kemudian disajikan melalui teks narasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, proses pelaksanaan pembelajaran PPKn belum merepresentasikan pendidikan moral. *Kedua*, guru tidak melaksanakan pembelajaran moral yang terencana dan sistematis dalam pembelajaran PPKn. *Ketiga*, pengetahuan siswa tentang moral rendah. *Keempat*, siswa mengalami miskonsepsi terhadap substansi dan tujuan PPKn. *Kelima*, muatan PPKn pada buku tematik Kurikulum 2013 tidak menguraikan materi tentang moral. *Keenam*, pendekatan *cognitive moral* melalui cerita dilema relevan sebagai solusi pengembangan bahan ajar PPKn untuk membelajarkan moral di sekolah dasar.

**Kata kunci:** *cognitive moral, PPKn, sekolah dasar*

## COGNITIVE MORAL APPROACH TO CIVICS EDUCATION MATERIAL DEVELOPMENT IN THE ELEMENTARY SCHOOL

### Abstract

The study was aimed at describing the implementation of the civics education subject as a means of moral education and the relevance of cognitive moral approach as a framework for developing civics education instructional materials. The study was descriptive analytical research using a qualitative approach. The subjects of the study were 122 fourth-grade students of elementary school and 4 teachers of civics education in four districts in Salatiga City. The data collection techniques were observation, questionnaires, interviews, and documents. The data were analyzed using interactive analysis of Miles and Huberman model and presented through descriptive narrative texts. The results show that *first*, civic education learning has not yet represented moral education. *Second*, teachers do not carry out planned and systematic moral learning in civics education learning. *Third*, students' moral comprehension is still low. *Fourth*, students have misconceptions about the substance and the purpose of civics education learning. *Fifth*, the content of civics education in the thematic book of Curriculum 2013 does not include the material related to moral learning. *Sixth*, the cognitive moral approach through the dilemma story is relevant as a solution for the development of civics education instructional materials to teach morals in the elementary school.

**Keywords:** *cognitive moral, civic education, elementary school education*

## PENDAHULUAN

Usia sekolah dasar merupakan fase kritis pembentukan sikap dan perilaku moral. Selain keluarga, lembaga pendidikan juga memiliki peranan penting sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai moral untuk membentuk kepribadian. Pentingnya pendidikan moral pada lembaga pendidikan juga diungkapkan oleh Lickona (2013, p. 25) yang menyatakan bahwa peran sekolah sebagai pendidik moral menjadi semakin vital pada saat jutaan orang anak hanya mendapatkan sedikit ajaran moral dari orang tua mereka dan ketika pengaruh dari tempat-tempat yang menjadi pusat nilai seperti tempat ibadah tidak hadir dalam hidup mereka.

Borba (2008, p. 5) mengungkapkan bahwa peran lembaga pendidikan untuk membelajarkan nilai moral menjadi hal yang fundamental mengingat lingkungan tempat anak dibesarkan dapat meracuni kecerdasan moralnya. Pendapat di atas secara jelas menguatkan bahwa peran lembaga pendidikan formal dalam membentuk moralitas siswa sangat besar. Pentingnya pendidikan moral juga dikemukakan Sze (2014) dalam penelitiannya yang menyarankan bahwa pendidikan moral dan karakter di masa yang akan datang harus terus dikembangkan sehingga nantinya dapat tercipta pendidikan moral yang terorganisir dan efektif dapat diperkenalkan ke siswa sekolah dasar.

Salah satu mata pelajaran yang diasumsikan paling tepat untuk membelajarkan nilai-nilai moralitas adalah Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Landasan yuridis yang mendasari persepsi ini diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan Pasal 77 K Ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa PPKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral pancasila. Selaras dengan landasan yuridis, Aryani dan Susatim (2010, p. 43) juga menguatkan bahwa PPKn membawa misi dan berbicara tentang nilai, moral, dan norma. Misi tersebut dijelaskan sebagai upaya membina, menegakkan, dan mengembangkan perangkat tatanan nilai moral. Pada praktiknya, PPKn juga diharapkan dapat melaksanakan tatanan nilai moral dalam kegiatan bermasyarakat. Hal tersebut selaras dengan uraian Winatapura dan Budimansyah (2007, pp. 188-190) yang menjelaskan bahwa salah satu kompetensi diharapkan dalam PPKn adalah kecakapan *interacting* yang merupakan kecakapan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain.

Pada implementasi pembelajaran PPKn di sekolah, Sarbaini, Kiptiah, dan Norjanah (2016) mengungkapkan bahwa pembelajaran PPKn cenderung membosankan karena menggunakan metode pembelajaran ceramah. Sarbaini, dkk. (2016) juga mengungkapkan bahwa suasana belajar PPKn yang membosankan dapat berakibat pada rendahnya daya serap siswa pada materi pelajaran dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Selanjutnya, komponen pembelajaran hasil penelitian Boakye (2017) menunjukkan bahwa isi kurikulum saat ini belum merepresentasikan pendidikan nilai dan moral. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dimaknai bahwa pengembangan bahan ajar yang mendukung pembelajaran moral sangat diperlukan saat ini.

Mengembangkan materi melalui bahan ajar menjadi solusi paling relevan jika mengingat keberagaman kompetensi, kreativitas, dan pola mengajar guru di berbagai sekolah. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Mukino, Purnomo, dan Suntoro (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran

guru untuk menanamkan nilai moral dan karakter pada kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai moralitas dan karakter pada materi atau bahan ajar. Francisca dan Ajiusmo (2016) menyatakan bahwa peran seorang pengajar tidak hanya mentransfer teknologi, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun moral dan karakter. Hasil penelitian Suyantiningsih, Munawaroh, dan Rahmadona (2016) juga mengemukakan bahwa pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam muatan mata pelajaran bidang studi signifikan untuk dilakukan. Oleh karena itu, optimalisasi pendidikan moral melalui proses pengembangan bahan ajar mendesak untuk dilakukan mengingat pentingnya pembelajaran nilai-nilai moral dan karakter di sekolah.

Pengembangan dan penyempurnaan bahan ajar menjadi hal yang semakin mendesak ketika terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi yang diharapkan dan uraian materi yang pada buku ajar. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Novianto & Mustadi (2015) yang menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi dasar dan uraian materi pada buku paket Kurikulum 2013 jenjang sekolah dasar. Hal tersebut menjadi keprihatinan mengingat buku Kurikulum 2013 merupakan buku pokok pembelajaran di sekolah dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketidaksesuaian tersebut jika tidak segera diatasi dapat dapat memicu berbagai permasalahan lain.

Sebagai salah satu upaya pengembangan, pendekatan *cognitive moral* menjadi salah satu solusi sebagai kerangka pengembangan bahan ajar yang mendukung pendidikan moral pada lembaga pendidikan formal. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Sarbaini (2012, p. 40) yang menyatakan bahwa *cognitive moral* merupakan salah satu cara

membelajarkan moral yang berorientasi pada perkembangan kognitif. Lickona (2013, p. 309) menjelaskan bahwa melalui pendekatan *cognitive moral* anak tidak akan terindoktrinasi untuk sekadar berkata “benar” atau “salah” namun mereka akan benar-benar berpikir secara mendalam.

Pada konteks yang lebih luas, perkembangan penalaran moral yang tinggi juga diharapkan memberikan kontribusi pada tindakan moralitas yang lebih baik pula. Pengaruh aspek kognitif pada tindakan moralitas didukung oleh fakta empirik penelitian Larson (2017) yang menunjukkan bahwa perilaku moral pada dasarnya merupakan representasi dari kemampuan kognitif. Marzuki dan Feriandi (2016) juga mengemukakan bahwa tindakan moral merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan moral dan perasaan moral yang dimilikinya secara sadar. Artinya, seseorang yang memiliki tindakan moral yang baik memiliki pengetahuan moral, ada keinginan untuk berbuat baik, dan akhirnya direalisasikan menjadi suatu tindakan. Oleh karena itu, tingginya pengetahuan dan kompetensi penalaran moral sangat berpengaruh pada tindakan moral seseorang.

Penelitian tentang PPKn dan moralitas bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, sebelumnya Vong (2016) telah melakukan analisis kritis terhadap kebijakan *civic education* dan moralitas di Macao. Temuan penelitian di antaranya adalah terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Macao untuk mengembangkan pendidikan moral dan *civic education*. Tiga strategi tersebut adalah memberikan nama “*governmentalisation of the state*”, mengkonstruksi moral dan *civic education* sebagai sarana untuk mengembangkannya, dan mengkreasi serta menyelaraskan

bentuk baru baru dari *civic victues* (ke-bajikan kewarganegaraan).

Sebagai langkah awal pengembangan bahan ajar PPKn berbasis *cognitive moral*, perlu dilakukan studi kualitatif tentang pembelajaran moral pada pembelajaran PPKn di sekolah dasar. Adapun studi kualitatif tersebut meliputi analisis pelaksanaan pembelajaran PPKn, kebutuhan siswa dan guru, serta bahan ajar yang digunakan saat ini pada pembelajaran PPKn khususnya yang berkenaan dengan aspek pendidikan moral. Oleh karena itu, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan moral di sekolah dasar dan mendeskripsikan relevansi *cognitive moral* sebagai kerangka pengembangan bahan ajar PPKn sebagai sarana pembelajaran moral di sekolah dasar.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitik. Subjek penelitian adalah 122 siswa kelas V dan 4 orang guru pengampu mata pelajaran PPKn sekolah dasar negeri yang terletak pada empat kecamatan di Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, angket, dan studi dokumen. Observasi dilakukan terhadap pembelajaran PPKn dengan mengacu pada pedoman observasi yang telah disusun sebelumnya. Fokus kegiatan observasi meliputi: model dan metode yang digunakan guru, respons siswa pada saat pembelajaran, muatan materi yang disampaikan guru, dan implementasi pembelajaran moral pada muatan mata pelajaran PPKn.

Wawancara dilakukan terhadap empat orang guru kelas sebagai pengampu Mata Pelajaran PPKn. Wawancara yang dilakukan

merupakan wawancara mendalam (*in depth interview*) namun tetap mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data berupa: persepsi guru terhadap bahan ajar PPKn yang saat ini digunakan, kritik dan saran terhadap penyempurnaan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran moral di sekolah, persepsi guru tentang peran PPKn terhadap wahana pendidikan moral, serta harapan guru terhadap pengembangan materi PPKn.

Instrumen angket yang digunakan merupakan angket terbuka yang memberikan kesempatan siswa untuk menuangkan pendapat dan pemikiran tentang PPKn. Angket berisi sembilan belas pertanyaan yang memuat pengetahuan siswa tentang PPKn, persepsi siswa tentang buku dan pembelajaran PPKn saat ini, pengetahuan siswa tentang moral, dan harapan siswa terhadap buku maupun pembelajaran PPKn ke depan. Studi dokumen dilakukan melalui analisis buku ajar tematik kelas V sekolah dasar tema 1 subtema “Wujud Benda dan Perubahannya”, sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung saat itu. Analisis terhadap kesesuaian buku ajar PPKn terhadap Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan jaring tema, kesesuaian buku ajar terhadap tahap perkembangan siswa sekolah dasar, dan kesesuaian muatan pembelajaran nilai, moral, dan karakter pada buku ajar dengan tujuan pembelajaran.

Teknik analisis data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen menggunakan analisis interaktif model *Miles and Huberman*. Sugiyono (2015, pp. 337-344) menyatakan bahwa analisis data interaktif model *Miles and Huberman* dilakukan melalui tiga langkah yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Data hasil angket dianalisis menggunakan analisis deskriptif persentase. Analisis

deskriptif persentase dapat dilakukan dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah responden kemudian dikalikan 100 persen (Sugiyono, 2015, pp. 207-210). Hasil analisis data temuan penelitian kemudian disajikan secara kualitatif melalui teks narasi untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan moral ditinjau dari aspek proses pembelajaran, kebutuhan guru, kebutuhan siswa, dan analisis buku tematik Kurikulum 2013. Hasil analisis data juga mendeskripsikan relevansi pendekatan *cognitive moral* sebagai kerangka pengembangan bahan ajar PPKn untuk membelajarkan moral di sekolah dasar.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis pembelajaran PPKn dilaksanakan melalui kegiatan observasi pada saat kegiatan pembelajaran pada empat sekolah dasar di kota Salatiga. Proses pelaksanaan pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 di sekolah dasar berlangsung melalui pembelajaran tematik yang terintegrasi dengan muatan mata pelajaran lain. Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran PPKn pada tema 1 subtema “Wujud Benda dan Cirinya” adalah menjaga keutuhan nasional dengan berfokus pada wilayah NKRI, keanekaragaman suku, budaya, dan adat. Kegiatan pembelajaran PPKn pada dua sekolah dasar dilaksanakan melalui kegiatan ceramah disertai tanya jawab. Meskipun demikian, pada salah satu sekolah dasar telah berupaya menggunakan metode diskusi kelompok dan melibatkan beberapa siswa untuk ikut berpartisipasi maju ke depan kelas untuk ikut menunjukkan beberapa wilayah Indonesia melalui peta nasional.

Berdasarkan pengamatan peneliti, guru kelas terlihat kebingungan melaksanakan pembelajaran tematik karena tahun 2017

merupakan tahun pertama pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kota Salatiga. Hal tersebut dapat diamati saat guru berulang kali membuka buku guru. Pada salah satu sekolah yang menjadi subjek penelitian, terdapat hal menarik karena buku paket tematik yang seharusnya dimiliki oleh siswa justru belum diterima oleh sekolah sehingga pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui LCD proyektor untuk menayangkan file *Pdf*. buku siswa. Berkenaan dengan pembelajaran moral, peneliti sama sekali tidak menemukan proses penanaman nilai-nilai moral maupun kegiatan ceramah yang berupaya membelajarkan moral pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran hanya berfokus untuk menyelesaikan tuntutan materi ajar PPKn seperti yang sudah tertera pada buku ajar. Hal tersebut semata-mata tidak menjadi kesalahan guru mengingat keterbatasan bahan ajar yang digunakan. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga tidak menggunakan sumber belajar lain untuk mendukung pendidikan moral pada saat pembelajaran PPKn.

Setelah melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran, peneliti melakukan wawancara kepada empat orang guru pengampu PPKn pada empat sekolah dasar di Kota Salatiga. Kegiatan wawancara difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat pembelajaran PPKn. Permasalahan tersebut meliputi kendala yang berkenaan dengan waktu, sumber belajar, materi, dan pelaksanaan pendidikan moral di sekolah. Kendala yang dihadapi guru pertama adalah pada aspek alokasi waktu. Tiga dari empat guru kelas mengungkapkan bahwa porsi pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 tidak lebih dari tiga jam pelajaran dalam seminggu dan materi yang tersedia juga sangat sedikit. Keterbatasan waktu tersebut tentunya berpengaruh pada penyampaian materi yang diberikan. Pada komponen

sumber dan materi ajar yang ada, guru kelas sebagai pengampu PPKn mengungkapkan bahwa sumber belajar yang digunakan saat ini hanya pada buku paket tematik yang disediakan oleh pemerintah. Para guru sama sekali tidak menambah materi ajar maupun mencari alternatif sumber belajar lain dari internet maupun referensi buku lain.

Komponen selanjutnya yang menjadi topik wawancara adalah mengenai pembelajaran moral di sekolah. Guru kelas V sebagai narasumber mengungkapkan bahwa pada dasarnya pembelajaran moral di sekolah telah dilaksanakan sejak zaman dahulu sebelum digiatkannya *moral education* pada akhir-akhir ini. Pendidikan moral di sekolah bukan pembelajaran di kelas yang bersifat eksplisit. Pendidikan moral yang telah dilaksanakan di antaranya adalah nilai moral pada cerita-cerita rakyat, pesan moral pada akhir pembelajaran, pembiasaan mencium tangan, dan menyapa guru, kepedulian sosial seperti menjenguk teman yang sakit, dan menolong teman yang terkena musibah, serta pembelajaran akhlak pada mata pelajaran pendidikan agama.

Pembahasan mengenai peran PPKn sebagai salah satu sarana pendidikan moral menjadi puncak wawancara kepada guru kelas V. Semua guru pada dasarnya telah mengetahui dan memahami PPKn sebagai mata pelajaran pembentuk kepribadian, menanamkan nilai-nilai moral, dan menjadi warga negara yang baik. Para guru secara umum mengetahui hal tersebut karena pada zaman dahulu nama PPKn di Indonesia adalah Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Oleh karena itu, asumsi guru bahwa pendidikan moral seharusnya dilaksanakan pada mata pelajaran PPKn. Permasalahan pembelajaran moral di sekolah diungkapkan oleh guru bersumber dari buku paket atau materi yang telah disediakan oleh pemerintah. Menurut empat orang guru

yang menjadi narasumber wawancara, pembelajaran moral secara eksplisit belum pernah dilakukan karena tidak terdapat tuntutan pada kompetensi dasar yang ada. Salah satu guru mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran hanya berfokus pada indikator kompetensi seperti yang dijabarkan dalam buku tematik.

Menurut pendapat dua orang guru, muatan dalam buku ajar tematik yang telah disediakan pemerintah saat ini berfokus pada pengembangan kompetensi ilmiah. Berbagai kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan *scientific*. Kesan yang ditimbulkan adalah siswa dituntut menjadi seorang cerdas, menyelesaikan sesuatu secara ilmiah dan berpikir logis. Konten tentang proses pembentukan perilaku, tata krama, dan moralitas, serta budaya ketimuran tidak diberikan penekanan dalam materi. Guru berharap pembelajaran karakter dan moral seharusnya tercakup dalam konten materi buku ajar. Melalui konten pendidikan moral dan karakter, siswa tidak hanya cerdas dan mampu untuk berpikir ilmiah, tetapi berkepribadian luhur sebagaimana diamanatkan pada Pancasila. Guru menegaskan bahwa dengan diintegrasikannya PPKn dalam buku ajar, semakin mempersempit ruang lingkup PPKn. Mata Pelajaran PPKn seharusnya mampu membelajarkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan, tetapi terbatas waktu dan padatnya muatan pelajaran lain seperti Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika membuat peran PPKn dalam membelajarkan nilai-nilai moral menjadi tidak maksimal.

Setelah melakukan kegiatan wawancara, peneliti memberikan angket terbuka kepada siswa kelas V yang memuat sembilan belas pertanyaan yang mencakup: pengetahuan siswa tentang PPKn, kegiatan pembelajaran, buku ajar, dan pengetahuan siswa tentang moral serta situasi dilema

moral. Pengetahuan siswa tentang PPKn menjadi pertanyaan pertama dalam angket terbuka, persepsi siswa tentang PPKn di antaranya adalah sebanyak 44,01% siswa menjawab PPKn membahas mengenai Pancasila, Pemerintah, UUD 1945 dan pasal-pasal; 30, 23% siswa menjawab PPKn membahas mengenai DPR, MPR dan Presiden; 22,6% siswa menjawab tentang budaya dan rumah adat; dan sebanyak 3,16% berbagai jawaban yang sangat beragam. Ironisnya, tidak ada satu pun siswa yang menjawab PPKn belajar tentang moral, perilaku, tingkat laku, cara hidup di masyarakat, atau pun menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut memberikan gambaran siswa sekolah dasar sama sekali tidak tahu tujuan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran untuk menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti, dan membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*). Persepsi siswa sekolah dasar tentang PPKn adalah bahwa mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang membosankan karena harus menghafal undang-undang, pasal-pasal, dan struktur pemerintahan yang sangat rumit.

Persepsi siswa tentang PPKn tersebut juga menimbulkan rendahnya daya tarik jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain seperti IPA, IPS, dan matematika yang sering melakukan eksperimen, diskusi, dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya, pada aspek buku ajar yang digunakan yaitu buku paket tematik yang disediakan oleh pemerintah, 32,4% siswa mengungkapkan bahwa buku yang saat ini digunakan menarik, 29% siswa menjawab sedang, 19% siswa menjawab lumayan, dan 20,6% siswa menjawab biasa saja. Beberapa persepsi siswa di antaranya adalah bahwa buku yang sekarang ceritanya kurang bagus, pelajarannya membingungkan, dan gambarnya kurang bagus. Adapun harapan siswa ketika menjawab pertanyaan

tentang buku yang bagus adalah 73% siswa menjawab buku yang gambarnya bagus, warnanya menarik dan banyak cerita yang menarik; 20% siswa menjawab banyak foto, bukan kartun, dan berwarna-warni; serta 7% siswa lain berbagai jawaban seperti buku yang mudah dipahami, tidak terlalu besar, dan ringan dibawa serta jawaban lain yang beragam.

Berkenaan dengan pembelajaran moral, 80% siswa menjawab belum pernah belajar tentang moral dan 20% siswa menjawab pernah namun lupa. Selanjutnya, seluruh siswa menjawab belum pernah belajar moral pada PPKn. Mengenai dilema moral, seluruh siswa sama sekali belum pernah mendengar tentang istilah dilema moral maupun cerita dilema moral. Siswa pada umumnya kebingungan tentang istilah dilema sehingga peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu istilah dilema. Setelah menyimak penjelasan peneliti, siswa sebenarnya tahu dan pernah mengalami istilah dilema, tetapi belum pernah belajar tentang hal tersebut. Uraian hasil angket menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang peran PPKn sebagai wahana pendidikan moral rendah. Sebagian besar siswa tidak mengetahui tentang moral. Siswa belum pernah belajar tentang dilema moral. Dilema moral merupakan upaya pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi *moral judgement* atau penalaran moral. Selain itu, siswa juga mengalami miskonsepsi terhadap substansi dan tujuan PPKn untuk membelajarkan nilai-nilai moral.

Setelah mendapatkan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan angket, peneliti melakukan analisis terhadap buku ajar PPKn yang digunakan sebagai sumber belajar utama, yaitu buku ajar Kurikulum 2013. Analisis mengenai bahan ajar dilakukan penulis pada tema 1 subtema "Wujud Benda dan Perubahannya".

Fokus kegiatan pembelajaran adalah pada kompetensi dasar 3.6 memahami perlunya saling memenuhi keperluan hidup dan 4.6 menyajikan dinamika saling memenuhi keperluan hidup antardaerah untuk menumbuhkan keutuhan nasional. Kompetensi dasar tersebut dijabarkan pada tiga kegiatan pembelajaran yaitu pembelajaran 3, 4, dan 6. Pada pembelajaran 3, materi pembelajaran meliputi pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Uraian materi membahas tentang asal barang pemenuhan kebutuhan seperti bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Adapun nilai moral yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran 3 adalah tentang kasih sayang orang tua sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia. Materi tentang kasih sayang tersebut tidak dilaksanakan melalui uraian materi ataupun ilustrasi cerita, namun hanya diberikan sebuah soal “Apakah kasih sayang merupakan kebutuhan?” Selain itu, terdapat sebuah pertanyaan tentang sikap seorang siswa jika kebutuhannya tidak terpenuhi melalui sebuah pertanyaan “Bagaimana sikapmu jika kebutuhanmu tidak tercukupi?” Kegiatan pembelajaran moral melalui cerita maupun uraian materi tidak ditemukan dalam materi ajar, tetapi hanya berupa pertanyaan refleksi saja.

Pada pembelajaran 4, fokus kegiatan pembelajaran PPKn masih dalam konteks yang sama yaitu pemenuhan kebutuhan, tetapi ruang lingkungannya lebih luas yaitu ruang lingkup tetangga. Selain itu, terdapat materi tentang asal daerah barang kebutuhan rumah sebagaimana tercantum dalam penjabaran indikator. Setelah menelaah isi buku, terdapat perbedaan uraian materi dengan indikator kompetensi. Uraian materi diawali dengan kegiatan merusak lingkungan, dampak kerusakan lingkungan, dan kaitannya

dengan pemenuhan kebutuhan. Pada muatan PPKn, tidak terdapat materi tentang berbagai kebutuhan namun lebih ditekankan pada pengetahuan dan pendapat siswa tentang beberapa contoh kebutuhan dalam kehidupan bertetangga. Adapun materi tentang nilai dan sikap tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi hanya melalui dua pertanyaan uraian terbuka tentang “Kenapa harus memenuhi kebutuhan hidup dalam bertetangga?” dan “Apa yang terjadi jika antar tetangga saling tidak memenuhi kebutuhan bertetangga?” Seperti pada pembelajaran sebelumnya, uraian materi, ilustrasi cerita tentang penanaman nilai moral tentang cara berperilaku, bersikap, dan ilustrasi-ilustrasi tentang kehidupan bertetangga sama sekali tidak dibahas dalam pembelajaran ini.

Pada pembelajaran 6, pembelajaran PPKn tidak berfokus pada pemenuhan kebutuhan seperti pada dua pembelajaran sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam penjabaran indikator pencapaian kompetensi, fokus pembelajaran PPKn adalah tentang mengidentifikasi dan menjelaskan manfaat kerja sama di rumah, sekolah, dan masyarakat. Uraian materi pembelajaran pada buku siswa mengalami penyimpangan pada pembelajaran 6. Berdasarkan analisis yang dilakukan, uraian materi ajar pada buku siswa berupa langkah-langkah meronce manik-manik, perubahan benda padat, cair dan gas, serta kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Tidak ditemukan materi PPKn tentang pentingnya kerja sama dan manfaat kerja sama seperti yang diuraikan dalam indikator pencapaian kompetensi. Seharusnya, konten materi pada pembelajaran 6 pada topik kerja sama dapat digunakan untuk memberikan nilai-nilai moral seperti tolong-menolong, saling membantu dalam kesusahan, kegotongroyongan, dan berbagai nilai-nilai



lain yang relevan. Penyimpangan konten materi yang ada belum merepresentasikan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan.

Berdasarkan data hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, dapat disintesis bahwa pembelajaran PPKn pada jenjang sekolah dasar belum merepresentasikan pembelajaran moral, baik secara substansi maupun prosesnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kebutuhan bahan ajar PPKn yang menunjang pembelajaran moral dan relevansi pendekatan *cognitive moral* sebagai salah satu solusi pemecahan masalah guna mengembangkan bahan ajar PPKn berdasarkan analisis kebutuhan. Adapun analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan yang ditinjau dari aspek proses pembelajaran, kebutuhan siswa, kebutuhan guru, dan analisis buku ajar PPKn yang digunakan saat ini.

*Pertama*, analisis kebutuhan berdasarkan proses pembelajaran. Pembelajaran PPKn yang saat ini dilakukan hanya berfokus pada penyampaian materi pokok sesuai tuntutan kompetensi dasar yang ada. Visi PPKn menyampaikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur kehidupan belum dapat dicapai dalam pembelajaran PPKn. Meskipun telah dilakukan pembelajaran kooperatif melalui diskusi kelompok, proses diskusi berfokus pada pemahaman materi saja. Pembelajaran PPKn yang mengikuti alur buku tematik justru membatasi peran guru dalam melakukan pembelajaran tentang moral. Padatnya materi dalam satu pembelajaran yang harus diselesaikan dalam waktu satu hari memacu guru untuk menitikberatkan pembelajaran pada materi yang sulit seperti matematika dan IPA. Hasil temuan tersebut diperkuat oleh Boakye (2017) yang mengemukakan bahwa perencanaan kurikulum dan pembelajaran

yang dilakukan di berbagai negara lebih memfokuskan pada aspek kemampuan ilmiah dan logika pada muatan mata pelajaran eksak, sedangkan bidang studi yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian dan karakter saat ini belum dapat mendapat perhatian khusus. Pengembangan materi ajar PPKn melalui pendekatan yang tepat diharapkan dapat menstimulasi pembelajaran yang mendukung penanaman nilai-nilai moral.

*Kedua*, analisis berdasarkan kebutuhan siswa. Ketertarikan siswa merupakan kunci dalam membelajarkan nilai-nilai moral melalui PPKn. Berdasarkan temuan penelitian, ketertarikan siswa pada PPKn sangat rendah. Siswa yang menganggap PPKn sebagai mata pelajaran yang mengharuskan mereka menghafal pasal-pasal dan sistem ketatanegaraan yang rumit menjadikan PPKn memiliki daya tolak di kalangan siswa sekolah dasar. Peran PPKn yang seharusnya membentuk perilaku, menanamkan nilai moral dan membentuk kepribadian luhur tidak dimengerti oleh siswa. Hal tersebut disebabkan selama ini pembelajaran PPKn yang jarang membahas tentang hidup di masyarakat dan masalah nilai moral. Hal tersebut terbukti dari rendahnya pengetahuan siswa tentang moral.

Melalui proses pengembangan bahan ajar, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik PPKn di kalangan siswa sekolah dasar sehingga lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai moral. Suyatno (2012) mengungkapkan bahwa keinginan batin dalam belajar moral dapat memberikan dampak positif dalam proses perubahan perilaku moral seseorang. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah merangkum harapan-harapan siswa tentang buku yang baik sesuai dengan keinginan siswa sekolah dasar, penyusunan bahan ajar dapat diakumulasi berdasarkan karakteristik

siswa sekolah dasar. Pentingnya minat dan rasa suka anak dalam belajar moral juga selaras dengan pendapat oleh Francisca dan Ajisuksmo (2015) yang mengungkapkan bahwa proses pembentukan karakter dan kepribadian tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman akan nilai-nilai kebaikan, tetapi membuat anak mencintai dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut. Ketika muncul rasa cinta terhadap nilai-nilai kebaikan (*moral feeling*), nilai tersebut dianut dan dengan mudah dilaksanakan atas kehendak hati nurani. Melalui *moral feeling* yang baik, secara otomatis pengetahuan moral siswa yang rendah dapat meningkat, bahkan dimungkinkan pula diiringi dengan peningkatan perilaku moralnya (*moral behaviour*).

*Ketiga*, analisis kebutuhan guru. Permasalahan yang dihadapi guru dalam membelajarkan nilai moral terdapat pada keterbatasan sumber belajar yang digunakan saat ini. Keterbatasan waktu dan kesibukan guru sekolah dasar yang mengampu semua mata pelajaran mengakibatkan guru tidak sempat untuk mengembangkan materi khusus ataupun mencari sumber belajar lain guna membelajarkan nilai-nilai moral. Meskipun pembelajaran moral saat ini sudah dilakukan secara implisit melalui pembiasaan perilaku, pembelajaran secara eksplisit melalui pembelajaran di dalam kelas juga mestinya mendapat prioritas khususnya dalam PPKn. Pentingnya pembelajaran tentang moral dan karakter dalam muatan mata pelajaran juga didukung hasil penelitian Suyantiningsih, Munawaroh, dan Rahmadona (2016) yang mengungkapkan bahwa nilai-nilai moral dan karakter seharusnya diintegrasikan dalam bidang studi. Pembelajaran moral yang dilakukan melalui nonkurikuler masih belum cukup untuk membina dan membentuk perilaku moral.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Zerrilo (2012) yang mengemukakan bahwa proses pembelajaran di sekolah sebagai salah satu lingkungan belajar turut dan berperan dalam perkembangan moral. Pembelajaran dan kurikulum sekolah memberikan sumbangan terbesar dalam membentuk proses berpikir pengambilan keputusan moral atau yang disebut sebagai *moral judgement*. Uzoka dan Njoku (2015) mengemukakan bahwa pembelajaran di sekolah melalui kerja sama, diskusi, dan pemberian umpan balik oleh guru dapat merangsang perkembangan *moral judgement*. Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung pendidikan moral sangat besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki guru perlu pengembangan bahan ajar khusus yang dapat menambah sumber belajar guna membelajarkan moral pada pembelajaran di kelas.

*Keempat*, analisis buku ajar PPKn. Hasil analisis buku ajar tematik Kurikulum 2013 khususnya pada muatan PPKn menunjukkan bahwa peran PPKn yang seharusnya membelajarkan dan menanamkan nilai moral belum dilaksanakan dengan maksimal. Adapun usaha yang telah dilakukan dalam membelajarkan moral yaitu melalui penyampaian pertanyaan refleksi yang menuntut siswa untuk berpikir dan menyadari sendiri nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam muatan materi ajar. Sebagaimana karakteristik moralitas siswa sekolah dasar, siswa harus dibimbing dan didampingi dalam proses pembentukan perilaku moral. Jaquith (2011) mengungkapkan bahwa relevansi bahan ajar terhadap karakteristik kepribadian siswa menjadi hal pokok yang harus dipenuhi bahan ajar tersebut. Berkenaan dengan bahan ajar yang

menunjang pembelajaran moral, bahan ajar tersebut harus diakumulasikan dengan karakteristik moral siswa sekolah dasar. Sinulingga (2016) mengungkapkan bahwa pada umumnya perkembangan intelektual dan emosional siswa sekolah dasar pada usia 6-12 tahun belum memiliki kesadaran imanen yang muncul dari nurani. Siswa pada usia tersebut harus selalu mendapat bimbingan dan arahan untuk membentuk pola berpikirnya. Karakteristik bahan ajar moral untuk siswa sekolah dasar seharusnya memiliki sifat merangsang proses berpikir kritis, tetapi alur konstruksi pengetahuan harus secara penuh didampingi oleh guru.

*Cognitive moral* sebagai salah satu pendekatan pembelajaran moral yang memfokuskan pada pengembangan proses berpikir kritis menjadi solusi untuk mengembangkan bahan ajar PPKn. Darmadi (2012, pp. 43-44) mengungkapkan bahwa *cognitive moral* lebih menekankan moralitas pada aspek transaksi intelektual taksonomi tinggi (*reasoning*) dalam mencari suatu pemecahan masalah yang termuat dalam stimulus yang diberikan. Stimulus tersebut disebut sebagai dilema. Oleh karena itu, kadar dilema sangat menentukan peringkat transaksi intelektual yang terjadi. Karakteristik pendekatan yang membentuk proses berpikir kritis tersebut dapat menunjang perkembangan intelektual dan emosional siswa sekolah dasar yang notabene belum sempurna. Kesesuaian pendekatan pembelajaran moral ini juga menjadi syarat dalam pembelajaran moral. Hal tersebut selaras dengan pendapat Yuningsih (2014) yang mengemukakan bahwa keberhasilan pendidikan moral hanya akan tercapai apabila pembelajaran dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan moral, intelektual, dan emosional anak.

Pada implementasinya, pendekatan *cognitive moral* dilakukan melalui pengembangan cerita dilema moral dalam bahan ajar. Zuriyah (2011, p. 19) mengemukakan bahwa pendidikan moral di sekolah secara umum dilakukan melalui pembahasan masalah dilema atau aspek pemikirannya. Dilema tersebut dimaksudkan untuk melatih siswa mengambil keputusan terbaik dengan segala konsekuensinya sehingga seringkali dilema moral diibaratkan seperti memakan buah simalakama. Oleh karena itu, pada pengembangan bahan ajar PPKn menggunakan kerangka pendekatan *cognitive moral*, cerita dilema merupakan inti dari pengembangan bahan ajar. Melalui cerita dilema moral, tingkat perkembangan moral siswa diharapkan mampu berkembang pada level yang lebih tinggi.

Cerita-cerita dilema moral secara fleksibel dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan siswa, kehidupan sosial dan budaya, serta tujuan pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan pendapat Marzuki dan Feriandi (2016) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran moral pada pembelajaran PPKn dapat dilakukan dengan mengambil topik-topik moralitas pada kehidupan sehari-hari. Fokus pengembangan cerita dilema sebagai salah satu upaya pelaksanaan pembelajaran moral tentunya diselaraskan dengan kompetensi dasar serta tema pembelajaran. Kesesuaian ilustrasi cerita, tema, dan indikator pencapaian kompetensi nantinya dapat memungkinkan untuk mengintegrasikan cerita-cerita dilema dengan pembelajaran mata pelajaran lain non-PPKn. Hal tersebut juga didasari atas kurikulum pembelajaran saat ini, yaitu Kurikulum 2013 yang dilaksanakan melalui pembelajaran tematik integratif.

Peran cerita dilema moral dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis juga dikemukakan oleh Darmadi (2012,

p. 127) yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran pendekatan *cognitive moral* melalui cerita dilema dapat menciptakan *moral conflict* dan pembinaan keterampilan pemecahan masalah (*problem thinking skill*). Oleh karena itu, *cognitive moral* juga dikaitkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Hal serupa dikemukakan oleh Samanci (2015) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa pengembangan kemampuan *moral judgement* (moral pada aspek penalaran atau kognitif) merupakan salah satu upaya meningkatkan *critical thinking*.

Peningkatan kemampuan berpikir kritis sebagai salah satu dampak penggunaan cerita dilema moral sangat relevan dengan salah satu tujuan PPKn untuk memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Winarno (2014, p. 36) yang menguraikan bahwa PPKn pada paradigma perubahan diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan dan persoalan yang senantiasa terus berkembang di masyarakat. Wahab & Sapriya (2011, p. 314) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membangun warga negara yang baik semata, tetapi warga negara yang cerdas (*smart citizen*) dalam menghadapi lingkungan kehidupannya. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar PPKn berbasis *cognitive moral* melalui cerita dilema yang mengakomodasi berbagai permasalahan di masyarakat diharapkan mampu menjadikan siswa memiliki kompetensi moral yang mumpuni.

## SIMPULAN

PPKn sebagai salah satu muatan pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah membawa misi dan berbicara tentang nilai, moral, dan norma. Fakta empiris pembelajaran PPKn di lapangan setelah dianalisis dari berbagai

sudut pandang menunjukkan bahwa pendidikan moral secara eksplisit belum tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Akibatnya, siswa mengalami miskonsepsi terhadap substansi dan tujuan PPKn. Mayoritas siswa menganggap PPKn sebagai mata pelajaran sulit, mereka harus menghafal sistem ketetapanegaraan yang sangat rumit. Pendidikan moral yang dilakukan saat ini hanya sebatas pembiasaan perilaku dan penyampaian nilai-nilai moral pada saat akhir pembelajaran sebagai refleksi saja. Pendidikan moral yang telah terlaksana tersebut tidak tersusun secara sistematis, sehingga keberhasilan pendidikan moral tidak dapat terukur dengan pasti. Buku ajar tematik yang digunakan pada pembelajaran PPKn juga belum menguraikan materi tentang moral.

Pendekatan *cognitive moral* merupakan salah satu solusi dalam pengembangan bahan ajar PPKn di sekolah dasar untuk membelajarkan nilai-nilai moral. *Cognitive moral* berupaya membentuk kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah moral. Hal tersebut relevan dengan karakteristik perkembangan moral siswa sekolah dasar yang belum sempurna kemampuan berpikir dan emosionalnya. Melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, diharapkan dapat merangsang perkembangan emosional dan membentuk karakter siswa sekolah dasar. Pengembangan kemampuan berpikir kritis juga menjadi salah satu tujuan PPKn. Hal tersebut didasari atas kondisi masyarakat yang terus berkembang sehingga memerlukan pemikiran kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, *cognitive moral* sangat relevan sebagai kerangka pengembangan bahan ajar PPKn sebagai sarana pembelajaran moral di sekolah dasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, I. K., & Susatim, M. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Boakye, S. (2017). The perception of highschool teachers' about developing moral character through the curriculum and the schools' culture in South Africa. *International Online Journal of Educational Sciences*, 9(1), 118-132.
- Borba, M. (2008). *Membangun kecerdasan moral: Tujuh Kebajikan Utama untuk Membentuk Anak Bermoral Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, H. (2012). *Dasar konsep pendidikan moral*. Bandung: Alfabeta.
- Francisca, L., & Ajisuksmo, C. R. P. (2015). Keterkaitan antara moral knowing, moral feeling, dan moral behavior pada empat kompetensi dasar guru. *Jurnal Kependidikan*, 45(2), 211-221.
- Jaquith, D. B. (2011). When is creativity? *Art Education*, 64(1), 14-19.
- Larson, C. A. (2017). A cognitive prototype model of moral judgment and disagreement. *Ethics & Behavior*, 27(1), 1-25.
- Lickona, T. (2013). *Pendidikan karakter*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, & Feriandi, Y. A. (2016). Pengaruh peran guru PPKn dan pola asuh orang tua terhadap tindakan moral siswa. *Jurnal Kependidikan*, 46(2), 193-206.
- Mukino, Purnomo, E., & Suntoro, I. (2016). Penerapan model moral reasoning untuk membentuk moralitas dan karakter siswa pada PPKn. *Jurnal Studi Sosial*, 4(1), 42-52.
- Novianto, A., & Mustadi, A. (2015). Analisis buku teks muatan tematik integratif, scientific approach, dan authentic assessment sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan*, 45(1) 1-15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Samanci, N. K. (2015). A study on the link between moral judgment competences and critical thinking skills. *International Journal of Environmental & Science Education*, 10(2), 135-143.
- Sarbaini. (2012). *Model pembelajaran berbasis kognitif moral*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sarbaini, Kiptiah, M. & Norjanah, A. (2016). Penggunaan model pembelajaran kognitif moral dalam meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(8), 621-627.
- Sinulingga, S. P. (2016). Teori pendidikan moral emile durkheim dan relevansinya bagi pendidikan moral anak di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(2), 215-248.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyantiningsih, Munawaroh, I., & Rahmadona, S. (2016). Pengembangan multimedia pembelajaran berbasis scientific approach terintegrasi nilai karakter. *Jurnal Kependidikan*, 46(1), 1-13.
- Suyatno. (2012). Nilai, norma, moral, etika dan pandangan hidup perlu dipahami oleh setiap warga negara. *PKn Progresif*, 7(1), 34-44.
- Sze, W. (2014). Evaluation of a moral and character education group for primary school students. *Discovery – SS Student E-Journal*, 3(7), 142-164.
- Uzoka, R. N., & Njoku, U. (2015). Environmental factors influencing the moral behaviour of secondary school students in Imo State Nigeria. *Rural*

- Environment Education Personality*, 2(5), 378-384.
- Vong, S. K. (2016). Harmonizing a melody?: A critical study of moral and civic education policy of the non-tertiary education system in Macao. *Asian Education and Development Studies*, 5(1), 71-93.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2014). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winatapura, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Konteks, landasan bahan ajar, dan kuktur kelas*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yuningsih. (2014). Menguatkan kembali pendidikan keagamaan dan moral anak didik. *Jurnal Istek*, 8 (2), 199-216.
- Zerrilo, L. (2012). The face of character: encouraging morality in children by confronting bullying through character education. *Journal of Student Scholarship*, 1(6), 1-15.
- Zuriah, N. (2011). *Pendidikan moral dan budi pekerti dalam perspektif perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.